

**PERAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAH DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009**

***THE ROLE OF LAW IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT SERVICES IN
REALIZING PUBLIC WELFARE BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2009***

TESIS

Oleh:

**OKSILIA YULITA INDAH, S.Th
2102190006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PERAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN
PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2009**

***THE ROLE OF LAW IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
SERVICES IN REALIZING PUBLIC WELFARE BASED ON LAW
NUMBER 11 OF 2009***

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**OKSILIA YULITA INDAH
2102190006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oksilia Yulita Indah
NIM : 2102190006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 14 November 2023



OKSILIA YULITA INDAH
2102190006



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN
PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2009

Oleh:

Nama : Oksilia Yulita Indah
NIM : 2102190006
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 14 November 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. John Pieris, SH.,MS.

Pembimbing II

Dr. Manotar Tampubolon, SH.,MH.

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Wwik Sri Widiarty, S.H.,M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. Bernadheta Nadeak M.Pd.,PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAMMAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 14 November 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Oksilia Yulita Indah
NIM : 2102190006
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. John Pieris, SH.,MS	Sebagai Ketua	
2. Dr. Manotar Tampubolon, SH.,MH	Sebagai Anggota	
3. Dr. Fernando Silalahi., ST., SH., M.H., C.L.A	Sebagai Anggota	

Jakarta, 14 November 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nam : Oksilia Yulita Indah
NIM : 2102190006
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan hak non eksklusif tanpa Royalti kepada universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan



Oksilia Yulita Indah

2102190006

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Allah yang Maha Esa, karena pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini adalah sebuah kajian yang diberi judul "Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009" Tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S-2) di Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta.

Penyusunan Tesis ini tidaklah mudah, tidak sedikit kesulitan yang penulis hadapi yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang sudah dan akan disampaikan kepada penulis. Terima kasih dan Tuhan Memberkati.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dr. Dhaniswara, K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. dr. Bernadhta Nadeak, M.Pd., PA. selaku Direktur Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia .
4. Prof. Dr. John Pieris, SH., MS., selaku Pembimbing dan penguji I, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
5. Dr. Manotar Tampubolon, SH., M.H., selaku Pembimbing Dan penguji II, yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan tesis.
6. Dr.Fernando Silalahi., ST., SH., M.H., C.L.A, selaku Penguji III, yang telah berbagi pengetahuan dan memperlengkapi peneliti dalam menguji tesis.
7. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu Penulis dalam hal-hal administratif.
8. Kedua orang tua penulis bapak Paulus Sudiryo, dan ibu Maria Koda, dan saudara ku tercinta Fidelis Elisabet, Velipa Christa Dirja, Vitria Natalia Yora, Herkules SX, Vankrasius Suberna Seda Nandes, Yosepina Fausta Nana, dan Mery Chirmas Bungga yang selalu mendokan dan mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, Kepada pimpinan Gereja bapak Sumarno Kosasih, bapak Edy Margono, dan Bapak Jimmy, yang selalu memberi keteguhan, motivasi kepada penulis, serta kepada teman seperjuangan khususnya dalam pengumpulan data dan informasi dalam penulisan tesis ini, kepada rekan teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum khusus prodi Hukum Tata Negara UKI 2022, Agus Widjajanto, Carlos KY Paath, Hedrikus Hali Atagoran, Herling Walangitang, Hotjen, Ivo Arzia Izma, Manganju Homonangan Simanullang, dan Menahim Saban, dan kepada rekan-rekan seangkatan Agusanto, Anggit, Bobby, Dhea Purba, Debora Realin, Debora Sintia, Gerald Wuhan, Habib Burraman, Hendri, Iqbal Ardiansyah, Joko Sugiarto, Marthen Lada, Natanael, Norinda Trifena Putri, Okto, Shinta Hasibuan, dan Sugandi, untuk setiap kenangan, kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui bersama-sama selama ini, serta selalu mendukung satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Tata Negara.

Jakarta, 14 November 2023

Oksilia Yulita Indah

2102190006

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKAS TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	25
1.3 Tujuan Penelitian... ..	26
1.4 Maksud Penelitian.....	26
1.5 Manfaat Penelitian.....	27
1.6 Batasan Penelitian.....	28
1.7 Metode Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Kerangka Teoritis dan Konsep... ..	31
2.2 Pengertian Konsep Teori Kesejahteraan... ..	37
2.3 Peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.....	47
2.4 Pelayanan Pemerintah dalam Mensejahterakan Masyarakat.....	57
2.5 Tujuan Kesejahteraan sosial dalam pembangunan masyarakat kesejahteraan Sosial.....	61
2.5.1 Organisasi Formal	65
2.5.2 Sponsor Sosial dan Akuntabilitas.....	65
2.5.3 Tidak adanya motif Provit sebagai Tujuan Program yang Dominan.....	66
2.5.4 Generalisasi Faksional: Pandangan Intergratif Tentang Kebutuhan Manusia	66
2.5.5 Kebutuhan Konsumsi manusia.....	67
2.6 Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menurut UU Nomor 11 tahun 2009... ..	71
2.6.1 Pemerintah dalam pendidikan	71
2.6.2 Pemerintah dalam pembangunan Desa	74
2.6.3 Pemerintah dalam pelayanan publik... ..	76
2.6.4 Pemerintah dan Intervensi Perkerja	79

2.7	Pancasila sebagai ideology pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat	82
2.8	Perkembangan Konsep <i>Welfare state</i> (Negara Kesejahteraan)	87
2.9	Model Negara Kesejahteraan di beberapa Negara	91
2.10	Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009	94
2.10.1	Hukum di Indonesia	94
2.10.2	Hukum dan Masyarakat	96
2.10.3	Kesejahteraan Masyarakat	98

BAB III MAKNA PERAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009.....

3.1	Faktor-faktor peran hukum Sulit Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia	107
3.2	Makna Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.....	114
3.3	Sejarah dan Perkembangan Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	122
3.4	Prosedur Penelitian.....	125
3.1	Studi Kepustakaan.....	126
3.2	Observasi.....	126
3.3	Prosedur dan teknik analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.....	128

BAB IV IMPLIKASI PERAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009.....

4.1	Konsep Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.....	143
4.2	Peran Hukum Menurut Undang-undang 1945... ..	149
4.3	Peran Hukum (Menjaga Ketertiban, Keadilan, dan Kepastian Hukum)... ..	150
4.4	Peran Hukum sebagai Sarana Transportasi Struktur dan Kultur Masyarakat	151
4.5	Peran Hukum Sebagai Pengendalian Sosial (<i>Sosial Control</i>) dan Rekayasa Sosial (<i>Sosial Engineering</i>)... ..	152
4.6	Peran Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat.....	154
4.7	Peran Hukum Sebagai Pengendalian Sosial.....	155
4.8	Hukum Sebagai Alat Kontrol Pembangunan... ..	156
4.9	Implikasi Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	157

4.10 Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2009..... 161

BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan... ..167

5.2 Saran.....168

DAFTAR PUSTAKA.....



ABSTRAK

Nama : Oksilia Yulita Indah
NIM : 2102190006
Judul : Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (UU No.11 Tahun 2009 pasal 1 telah diatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.

Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan membuat suatu undang-undang. Undang-Undang nomor 11 pasal 1 ayat (1) di tulis oleh lembaga negara yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang berdasarkan UUD tahun 1945 dan undang-undang yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang tersebut ditujukan kepada orang-orang yang memiliki perkara sesuai dengan pelanggaran atau peraturan yang sudah dimaktubkan dalam isi undang-undang tersebut.

Kesejahteraan sosial merupakan hasil dari pembangunan kesejahteraan sosial itu sendiri. Dalam kehidupan berkejahteraan sosial itu, manusia Indonesia berkesempatan luas melaksanakan tujuan batinnya, yaitu menyempurnakan dirinya dan tujuan lahir, berupa menyempurnakan alam sekitarnya. Sesuai dengan tugas kemanusiaanya yang dikarunikan oleh Allah Yang Maha Pencipta. Pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah menjadi ukuran kinerja pemerintah.

Metode penelitian Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Berikut adalah beberapa metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti, diantaranya adalah menggunakan data sekunder sebagai berikut yaitu Study Pustaka, Analisis Data, dan Media Massa.

Kata kunci : Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009.

ABSTRACT

Name : Oksilia Yulita Indah
NIM : 2102190006
Title : The Role Of Law In The Implementation Of Government Services In Realizing Public Welfare Based On Law Number 11 Of 2009

The purpose of implementing social welfare (Law No: 11 of 2009 article 1 has been regulated on the implementation of social welfare which states that: social welfare is a condition of meeting the material, spiritual, and social needs of citizens in order to live a decent life and be able to develop themselves, so that they can carry out their social functions. Community independence can be achieved certainly requires a community learning process that follows a good learning process, gradually gaining power, strength or ability that is useful in the decision-making process independently.

The role of law in realizing public welfare towards the implementation of government services in realizing community welfare based on Law Number 11 of 2009. The legislature is a state institution that has the authority to draft and make laws. Law number 11 article 1 paragraph (1) is written by a state institution that has the authority to make laws based on the 1945 Constitution and laws that have been made by the competent authority are addressed to people who have cases in accordance with the violations or regulations that have been stated in the contents of the law.

Social welfare is the result of the development of social welfare itself. In this social welfare life, Indonesian people have a wide opportunity to carry out their inner goals, namely perfecting themselves and the original goal, in the form of perfecting the surrounding nature. In accordance with his humanitarian duty gifted by Allah the Almighty. Service to the community has now become a measure of government performance. Research methods The author in this study uses qualitative methods, Here are some skinative research methods used by researchers in researching, including using secondary data as follows, namely Library Study, Data Analysis, and Mass Media.

Keywords: The Role of Law in Realizing Community Welfare, based on Law number 11 of 2009.